SIRD #101
SOCIAL INVESTMENT ROUNDTABLE DISCUSSION

Social Investment Indonesia

FREE

DAPATKAN GIVEAWAY !

BLUE ECONOMY:

Membangun Masa Depan Investasi Sosial Berbasis Laut untuk Ketahanan Pangan dan Indonesia Berkelanjutan



Prof Rokhmin Dahuri, M.S.
Pakar Kelautan dan Perikanan Indonesia



Dina Darmayanty K.
Chairperson
Pesisir Lestari



Jalal
Chairperson of Advisory Board
Social Investment Indonesia

Host:



Nur Astri Mufthia S.
Associate
Social Investment Indonesia

Jumat, 31 Juli 2026

15.00 - 17.00 WIB

socialinvestment.id

0813-8808-511

Via zoom @SocialInvestment_Id

SIRD #101
SOCIAL INVESTMENT ROUNDTABLE DISCUSSION
Social Investment Indonesia

BLUE ECONOMY:

Membangun Masa Depan Investasi Sosial Berbasis Laut untuk Ketahanan Pangan dan Indonesia Berkelanjutan



Jalal
Chairperson of Advisory Board
Social Investment Indonesia

Professional Experience:

- ***Mendirikan A+ CSR Indonesia,***
- ***Ketua Dewan Penasihat Social Investment Indonesia (SII),***
- ***Ketua Dewan Pakar Social Value Indonesia,***
- ***Anggota Dewan Institute for Certified Sustainability Practitioners (ICSP),***
- ***Pendiri sekaligus reader di Thamrin School of Climate Change and Sustainability,***
- ***Anggota Komite Nasional Pengendalian Tembakau***
- ***Mitra strategis CCPHI Partnership for Sustainable Community***

Educational Experience

- ***S1 – IPB University***
- ***S2 - Sosiologi Universitas Indonesia***
- Pendidikan eksekutif terkait keberlanjutan perusahaan dan ESG di Sloan School of Management, Massachussetts Institute of Technology (MIT Sloan); Tsinghua University School of Economics and Management (Tsinghua SEM); University of Cambridge Institute for Sustainability Leadership (CISL); Harvard Business School (HBS); London Business School (LBS); University of Oxford Said Business School (Oxford Said), dan University of California Berkeley, School of Law (Berkeley Law).

BEDAH BUKU

Ethics and Social Licence in the Blue Economy

[Breakey & Sampford, eds., 2026]

Etika dan Lisensi Sosial dalam Ekonomi Biru:
Membaca Ulang Fondasi Moral Pembangunan Kelautan

Jalal

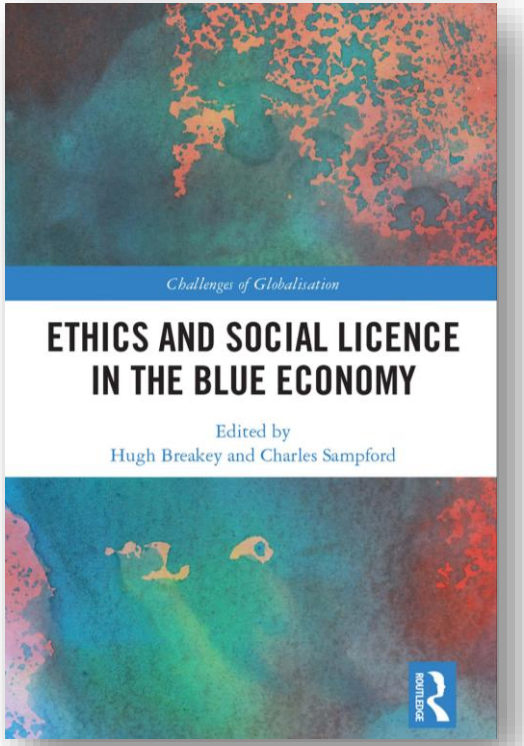
Chairperson of Advisory Board, Social Investment Indonesia (SII)

Social Investment Roundtable Discussion — SIRD #101 BLUE ECONOMY

31 Juli 2026

TENTANG BUKU

Penyunting, Penulis, dan Profil Buku



Data Buku

PENERBIT

Routledge (Taylor & Francis), 2026

SERI

Challenges of Globalisation
(ed. C. Sampford & M. Lewis)

TEBAL

201 halaman · 2 bagian, 9 bab

ISBN (EBK)

978-1-003-59899-2

AKSES

Dapat dibeli melalui dengan harga Rp5,7 juta di: https://opentrolley.co.id/book/9781032972053/ethics-social-licence-in-the

Hugh Breakey

Deputy Director & Principal Research Fellow (Filsafat Moral), Institute for Ethics, Governance and Law (IEGL), Griffith University.

Charles Sampford

Foundation Dean, Griffith Law School (1991) & Foundation Director IEGL (2004); diakui ARC sebagai salah satu dari 20 peneliti paling berpengaruh di Australia (2008).

11 Kontributor Lintas Disiplin

Filsafat moral, hukum, kebijakan kelautan, dan ilmu sosial — dari Institute for Ethics, Governance and Law, Griffith University dan mitra riset Australia.

- Graham Wood
- Melea Lewis
- Larelle Bossi
- Fiona Hamilton
- Rebecca Marshallsay
- Katja Cooper
- Michael Mehmet
- Jennifer Algie
- Freya Croft
- Michelle Voyer

BAGIAN PEMBUKA

Pendahuluan

Ethics and Social Licence in the Blue Economy

Hugh Breakey & Charles Sampford

Mengapa Filsafat Moral Terapan?

1

Memandu perilaku & kebijakan

Membawa kejernihan analitis pada konsep yang ambigu seperti SLO, sehingga membantu keputusan individu, organisasi, dan regulator.

2

Meningkatkan literasi etika

Memperkuat kemampuan menjustifikasi & mengartikulasikan posisi moral — sekaligus memahami posisi pihak lain.

3

Menyingkap asumsi tersembunyi

Klaim "berbasis sains/data" selalu membawa muatan nilai yang tak terucap; filsafat moral memaksa nilai itu diperiksa terbuka.

BAGIAN 1

Social Licence to Operate
(Bab 1–5)

Konsep SLO secara umum, berlaku luas di luar konteks kelautan.

BAGIAN 2

Etika Ekonomi Biru
(Bab 6–9 & Kesimpulan)

Fokus SLO & etika pada industri kelautan spesifik.

Understanding and Ethically Analysing the Social Licence to Operate

Hugh Breakey, Charles Sampford & Graham Wood

SLO dibedah lewat tiga jenis legitimasi moral yang saling berjenjang — sebuah operasi bisa saja memiliki satu legitimasi tanpa yang lain:

Legitimasi Sosial

Fakta deskriptif: apakah operasi benar-benar diterima komunitas saat ini — terlepas dari alasan atau dasar penerimaan itu.

Legitimasi Nilai-Lokal

Apakah operasi sesuai nilai & ekspektasi moral komunitas setempat — tetap layak diterima meski pelanggarannya belum terungkap ke publik.

Legitimasi Moral Menyeluruh

Penilaian etis independen: apakah operasi memang pantas diterima secara moral, di luar persepsi komunitas maupun norma lokal manapun.

***Implikasi praktis**: ketiganya tidak otomatis sejalan — operasi bisa punya penerimaan sosial luas namun gagal secara moral menyeluruh, atau sebaliknya, tampak "bersih" secara moral namun belum diterima komunitas. Karena itu ketiga jenis legitimasi ini perlu dinilai terpisah, bukan diasumsikan otomatis selaras.*

Sikap komunitas adalah kontinum (dukungan – toleransi – penolakan aktif), bukan status biner "ada/tidaknya" SLO. Karena kuasa dapat berat sebelah, SLO bisa berfungsi sebagai senjata aktivis maupun tameng industri — namun konsep ini tetap layak dipertahankan sebagai bagian dari sistem integritas yang lebih besar (dibahas lengkap di Bab 6–7).

Social Licence and Legal Licence: Analysing the Analogy

Charles Sampford & Melea Lewis

Sembilan pertanyaan pembanding dari bab ini dirangkum dalam empat tema kunci — Lisensi Legal (LLO) vs Lisensi Sosial (SLO):

Tema Pembanding	Lisensi Legal (LLO)	Lisensi Sosial (SLO)
Dari siapa & atas wewenang apa?	Pejabat resmi; wewenang berasal dari konstitusi/undang-undang yang jelas.	Tidak ada otoritas formal — melekat pada masyarakat terdampak & opini publik.
Untuk aktivitas, syarat & durasi apa?	Aktivitas & kondisi tertulis eksplisit; punya tanggal berakhir (dapat diperpanjang).	Ekspektasi implisit & kategori umum; cair, bisa berlangsung lebih lama dari LLO atau hilang mendadak.
Menyasar siapa — spesifik atau menular?	Ditujukan tegas pada organisasi/entitas tertentu yang memegang izin.	Difus & menular: kegagalan satu operator bisa mendiskreditkan seluruh kategori aktivitas, siapa pun pelakunya.
Dengan sanksi apa & atas dasar apa dicabut?	Sanksi & kriteria pencabutan/perpanjangan baku, tertulis dalam regulasi.	Sanksi berupa protes, boikot, reputasi — tak berbatas maksimum, sering kali risikonya lebih besar dari sanksi LLO.

***Wawasan**: SLO tidak memiliki lembaga formal pemberi izin — sifatnya lebih cair, difus, dan responsif, namun juga lebih rentan disalahgunakan dari kedua arah (industri maupun aktivis) karena tak ada batas atau prosedur baku.*

SLO: A Conceptual and Analogical Analysis

Graham Wood

Contoh: Kasus “Tarkine”

Sebutan untuk kawasan liar di barat laut Tasmania yang sengaja diciptakan para pegiat lingkungan — bukan nama historis — demi mendorong perlindungan hukum kawasan itu. Contoh nyata bagaimana ‘makna’ sebuah konsep bisa lahir dari tujuan sosial-politik, bukan sekadar deskripsi netral atas dunia.

***Analogi bagi SLO**: konsep SLO pun mungkin ‘diciptakan’ secara sosial-politik oleh pihak yang berkepentingan atasnya — bukan semata ditemukan begitu saja di dunia.*

SLO: Oksigen atau Flogiston?

Wood mengajukan analogi kimiawi: apakah SLO seperti ‘oksigen’ (konsep yang benar-benar merujuk & memetakan dunia dengan baik), seperti ‘flogiston’ (konsep usang yang gagal memetakan realitas, atau bahkan tak merujuk apa pun), ataukah seperti ‘Tarkine’ — rujukannya ada, tapi hanya karena manusia sengaja menciptakannya?

***Implikasi**: jawaban atas pertanyaan ini menentukan apakah kita harus percaya diri memakai SLO, memerbaiki definisinya, atau berhenti memakainya sama sekali.*

> *Sebelum bisa menilai apakah suatu keadaan adalah SLO, kita harus lebih dulu memutuskan pemaknaan mana atas konsep itu yang seharusnya diterima sebagai ‘benar’. Deskripsi (is) vs preskripsi (ought): perdebatan tentang SLO sering kali sesungguhnya adalah perdebatan tentang makna, bukan fakta.*

Four Types of Social Licence to Operate

Hugh Breakey, Graham Wood, Larelle Bossi & Charles Sampford

Authentic

Sungguh-sungguh berupaya layak didukung; legitimasi *genuine*, dibangun lewat kinerja nyata — bukan sekadar diterima.

Tick-Box

Memenuhi daftar periksa formal (sertifikasi, laporan kepatuhan) tanpa keterlibatan substantif atas apa yang menjadi kekhawatiran komunitas.

Default

Dukungan pasif yang muncul begitu saja karena minim perhatian publik — rapuh dan bisa runtuh mendadak begitu tersorot media.

Deceptive

Kesan diterima dibangun lewat manipulasi persepsi & *framing*, bukan perbaikan substansi operasi yang sesungguhnya.

Kerangka "Four Cs" untuk Authentic SLO: Conduct (perilaku nyata) • Consequence (dampak aktual) • Credibility (kredibilitas) • Connection (keterhubungan tulus)

Jenis SLO tidaklah permanen — ia bisa berpindah. SLO Default yang rapuh dapat runtuh mendadak begitu terekspos protes atau liputan media; sebaliknya, SLO Tick-Box yang tampak solid di atas kertas bisa mendadak terbongkar ketika insiden lapangan mengungkap kesenjangan antara klaim dan praktik nyata.

Moving Beyond a Social Licence to Operate: Locating Cultural Licence to Operate Within Country

Larelle Bossi & Fiona Hamilton (perempuan senior Trawlwulwuy, Tasmania)

Country sebagai hukum hidup

Country — termasuk Sea Country — dipahami sebagai sistem hukum, spiritual, dan kekerabatan yang hidup, bukan sumberdaya untuk diklaim (berbeda dari kerangka UNCLOS).

Risiko SLO tanpa CLO

Tanpa CLO, suara Masyarakat Adat berisiko diperlakukan sekadar sebagai satu ‘pemangku kepentingan’ di antara banyak — sesuatu yang bisa dinegosiasikan, ditekan, atau bahkan diabaikan, alih-alih dihormati sebagai otoritas yang berdiri sendiri.

Contoh nyata: pengakuan konstitusional Tasmania

Amandemen Konstitusi Tasmania 2016 secara resmi mengakui masyarakat Palawa sebagai pemilik asli & berkelanjutan atas tanah dan perairan mereka — model pengakuan struktural, bukan sekadar konsultasi prosedural, yang dituntut CLO.

Ethical Values and SLO in the Blue Economy

Hugh Breakey, Rebecca Marshallsay, Larelle Bossi, Charles Sampford & Katja Cooper

Istilah ‘Blue Economy’ lahir di KTT PBB Rio+20 (2012): pertumbuhan ekonomi laut yang berkelanjutan, adil, dan sah secara sosial. Kajian literatur sistematis + wawancara praktisi menghasilkan 8 prinsip etika berikut:

Perlindungan Lingkungan

Menjaga ekosistem laut dari kerusakan akibat aktivitas ekonomi.

Ke-1 dari kajian literatur

Keadilan (Fairness)

Distribusi manfaat & beban yang adil antar pemangku kepentingan.

Ke-2 dari kajian literatur

Kebajikan (Beneficence)

Aktif mendatangkan manfaat nyata bagi komunitas & lingkungan.

Ke-3 dari kajian literatur

Partisipasi Pemangku Kepentingan

Keterlibatan aktif berkelanjutan, bukan sekadar sosialisasi formal.

Ke-4 dari kajian literatur

Pencegahan Bahaya

Mengantisipasi & meminimalkan risiko sebelum dampak buruk terjadi.

Ke-5 dari kajian literatur

Keterikatan Tempat

Mengakomodasi makna & nilai lokal yang melekat pada wilayah laut.

Ke-6 dari kajian literatur

Integritas

Konsistensi antara klaim etis perusahaan dengan praktik nyatanya.

ke-7 · dari analisis legitimasi

Kepedulian (Care)

Kepedulian tulus — bukan transaksional — pada laut & manusia.

ke-8 · dari wawancara praktisi

Ethical Risk in the Blue Economy Integrity System

Hugh Breakey & Charles Sampford

8 Prinsip Etika

Diterapkan sistematis

Pemangku Kepentingan

Studi kasus: akuakultur

Sistem Integritas

Regulasi, sertifikasi, media, LSM...

Risiko Etis Residual

Kekhawatiran yang tak sepenuhnya tertangani

Tiga peran kunci dalam sistem integritas:

Pemerintah	Satu-satunya aktor dengan mandat & kuasa mengkurasi sistem secara sistemik (regulasi, insentif, kelembagaan) — namun dibatasi anggaran & jurisdiksi berlapis (lokal-negara bagian-federal).
Industri	Agen langsung perubahan: mengendalikan kebijakan internal, insentif karyawan, teknologi, dan pemantauan kepatuhan — tak bisa mendelegasikan tanggung jawab etisnya ke pihak lain.
Aktor lain (media, peneliti, LSM)	Harus menjaga independensi dari perusahaan agar kredibel menjalankan peran pengawasan — kedekatan berlebihan justru melemahkan fungsi integritas mereka.

Risiko etis dapat muncul dari niat baik yang tergesa — mis. energi terbarukan lepas pantai yang dikebut demi target Net Zero berisiko melewatkan mekanisme checks-and-balances yang memadai.

Memindahkan Akuakultur ke Laut Lepas: Bagaimana Profil Risiko Etis Bergeser

Tabel 7.2: pergeseran risiko etis dari akuakultur pesisir ke laut lepas ('exposed ocean')

Kekhawatiran Etis	Perubahan Risiko
Kegagalan struktur secara katastropik	● Meningkat
Keselamatan pekerja	● Meningkat
Akses ke lembaga pengawas/pemantauan	● Meningkat
Kesejahteraan hewan	● Tergantung konteks
Persetujuan First Nations (Masyarakat Adat)	● Tergantung konteks
Dampak ke pengguna laut lain	● Menurun
Dampak ke ekologi pesisir	● Menurun
Dampak sosial (visual, kebisingan)	● Menurun

***Wawasan**: memindahkan operasi ke laut lepas menurunkan sebagian risiko sosial & ekologis pesisir, namun menaikkan risiko keselamatan, kegagalan struktur, dan pengawasan. Trade-off ini harus dikelola secara sengaja — lewat perencanaan tata ruang laut & pemantauan independen — bukan dianggap otomatis 'lebih aman'.*

Blue Ethics and Ocean Values: Overcoming Sea Blindness

Larelle Bossi

"Sea Blindness"

Fenomena pembuat kebijakan mengabaikan kompleksitas & interdependensi ekosistem laut — bukan sekadar kelalaian, tapi cara pandang yang keliru.

Kritik atas framing laut sebagai "sumberdaya senilai US$6 triliun" dan mekanisme pasar (blue bonds/credits) yang belum tentu mengekang eksploitasi.

Laut secara historis diasosiasikan dengan kualitas 'feminin' — interkoneksi, dinamisme, keberagaman — yang justru ditekan oleh tata kelola neoliberal yang 'maskulin': kontrol, individualitas, dominasi.

Tabel 8.1 — Pergeseran dari Nilai Neoliberal ke Nilai Oseanik

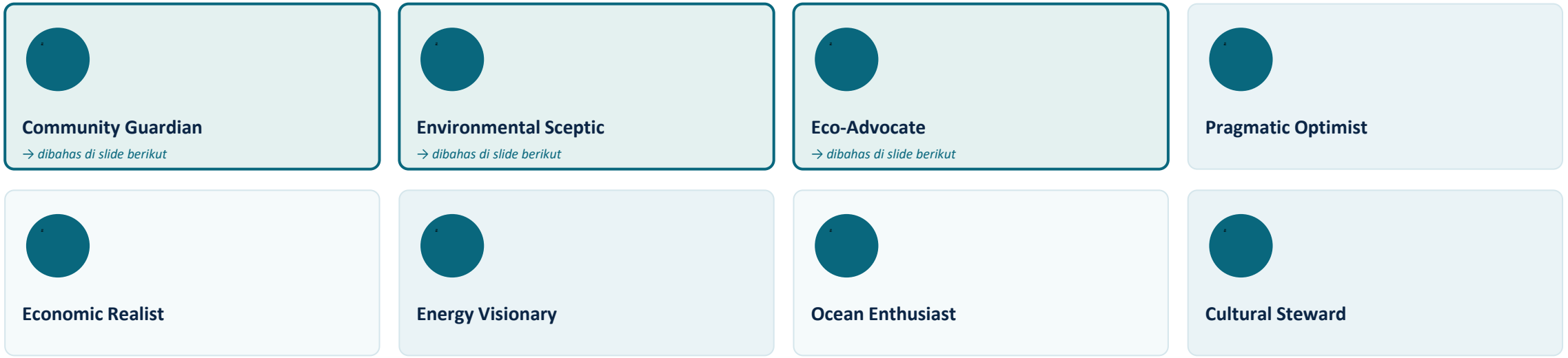
Interkoneksi *(saling bergantung)*	**Individualitas** *(mandiri, berdiri sendiri)*
Dinamisme *(perubahan, adaptasi)*	**Kontrol** *(kaku, standar, stabil)*
Transparansi *(keterbukaan)*	**Opasitas** *(ambigu, tertutup)*
Diversitas *(kompleksitas, koeksistensi)*	**'Imperium Diri'** *(homogen, sentralistik)*
Kerentanan *(risiko bersama)*	**Kekuatan** *(dominasi, kendali)*

Mengusulkan lima nilai etis berbasis karakter laut menuju "budaya etika laut" (ethical ocean culture) yang baru — melampaui sekadar baseline regulasi.

Not Just for and Against: Sikap Pemangku Kepentingan terhadap Energi Angin Lepas Pantai

Hugh Breakey, Larelle Bossi, Charles Sampford, Michael Mehmet, Jennifer Algie, Freya Croft & Michelle Voyer

Metode: social listening + 2 lokakarya komunitas soal rencana zona angin lepas pantai Illawarra, Australia — menghasilkan 8 persona berbasis data:



Meski berbeda fokus etis & pandangan dunia, ditemukan titik temu yang menjanjikan bagi deliberasi, kompromi, dan konvergensi kebijakan.

Tiga Persona sebagai Contoh: Bagaimana Analisis Etis Bekerja

Setiap persona dipetakan lewat tiga lapis: kekhawatiran inti, gaya komunikasi, dan landasan etisnya.

Community Guardian

KEKHAWATIRAN INTI

Menilai tinggi komunitas lokal, estetika & keberlanjutan ekonomi; khawatir ladang angin mengubah karakter budaya & alam kawasan; memrioritaskan suara warga lokal.

GAYA KOMUNIKASI

Emosional & anekdotal, menonjolkan pengalaman hidup warga; kadang menyoroti skenario terburuk.

LANDASAN ETIS

Etika biokultural/berbasis-tempat: menghargai cara hidup lokal sekaligus keterkaitannya dengan ekologi setempat.

Environmental Sceptic

KEKHAWATIRAN INTI

Khawatir soal *greenwashing* & efikasi energi; memertanyakan keandalan ladang angin lepas pantai & solusi industrial berskala besar; mendukung diversifikasi energi terbarukan.

GAYA KOMUNIKASI

Menantang klaim keberlanjutan dengan argumen tandingan rinci, mengutip studi independen.

LANDASAN ETIS

Cenderung populis — skeptis pada elite & pakar mapan; lebih percaya riset sendiri ketimbang klaim resmi.

Eco-Advocate

KEKHAWATIRAN INTI

Komitmen kuat memerangi krisis iklim lewat energi bersih, diimbangi perlindungan lingkungan; ingin dampak minimal pada ekosistem laut & burung.

GAYA KOMUNIKASI

Argumen logis & berbasis-bukti, merujuk studi ilmiah; menghargai transparansi kajian lingkungan.

LANDASAN ETIS

Etika konsekuensialis dipadukan nilai biokultural — fokus pada hasil terbaik bagi dunia secara keseluruhan.

KESIMPULAN BUKU

Building Authentic SLO for the Blue Economy

Hugh Breakey & Charles Sampford

5 Prinsip — Terpenuhi dengan Menjadi Pelaku Pasar yang Baik

- Kebajikan (*Beneficence*)
- Integritas
- Kepedulian (*Care*)
- Pencegahan Bahaya
- Perlindungan Lingkungan

Menjadi operator bisnis berkualitas yang dipercaya karyawan, regulator, pemasok, dan tetangga — perusahaan kecil unggul lewat kedekatan komunitas & pengetahuan lokal; perusahaan besar unggul lewat sumberdaya sistematis & peran ESG khusus.

3 Prinsip — Butuh Upaya Proaktif + Kebijakan Pemerintah

- Keadilan (*Fairness*) — perlu skema pembagian manfaat komunitas (community benefit-sharing), sebab distribusi manfaat sering di luar kendali perusahaan sendiri.
- Partisipasi Pemangku Kepentingan — prinsip paling menuntut: perlu keterlibatan proaktif berkelanjutan, bukan formalitas satu arah.
- Keterikatan Tempat — mengakomodasi nilai & pengguna ruang laut lain, mis. lewat perancangan lokasi turbin yang memertimbangkan pemandangan warga pesisir.

***Kesimpulan**: mewujudkan Ekonomi Biru yang berkelanjutan, adil, dan sah secara sosial adalah tanggung jawab bersama — industri, pemerintah, LSM, dan peneliti — bukan industri semata.*

Lima Kekuatan Buku dan Relevansinya bagi Indonesia

Kerangka filosofis kokoh & operasional	Tiga jenis legitimasi + “Four Cs” Authentic SLO bisa langsung dipakai sebagai alat asesmen SLO oleh korporasi kelautan & tambang Indonesia.
8 Prinsip Etika Ekonomi Biru berbasis riset	Digali dari kajian literatur sistematis + wawancara praktisi — memperkaya kerangka ESG/TJSL nasional yang kerap masih berhenti pada kepatuhan formal.
Pengakuan tegas Cultural/Sea Country Licence	Sangat relevan bagi ribuan masyarakat hukum adat pesisir Indonesia. Pencabutan izin tambang nikel di Raja Ampat (Juni 2025) menegaskan mahalnya SLO yang diabaikan.
Metodologi persona berbasis bukti	*Social listening* & lokakarya dapat diadaptasi untuk pemetaan pemangku kepentingan projek strategis — PLTSa, energi terbarukan lepas pantai, Peta Jalan Ekonomi Biru Bappenas.
Kritik reflektif atas risiko SLO & komodifikasi laut	Pengingat penting saat Indonesia menyusun Peta Jalan Karbon Biru (diluncurkan di COP30, November 2025) agar tak tergelincir ke *greenwashing*.

Ruang Perbaikan yang Masih Ditemukan

1 Bias konteks Australia

Studi kasus dominan berasal dari Australia (Illawarra, First Nations/native title) — perlu adaptasi & pembanding untuk negara kepulauan tropis-multietnis seperti Indonesia.

2 Minim ekonomi-politik rantai pasok global

Pembahasan relatif sedikit menyentuh kekuasaan korporasi transnasional & rantai pasok global (mis. nikel untuk baterai EV) yang justru sering menjadi akar konflik SLO di negara berkembang.

3 Minim metrik implementasi terukur

Kerangka 8 prinsip & Four Cs bersifat deskriptif-analitis; belum menyediakan indikator, skema insentif, atau mekanisme pemantauan yang siap pakai bagi praktisi harian.

4 Diskusi teknologi digital masih kelewat ringkas

Peran *social listening*/AI sebagai elemen baru sistem integritas dibahas singkat, padahal berisiko besar (misinformasi, polarisasi) di ranah digital seperti Indonesia.

Penutup: Refleksi dan Rekomendasi

Buku ini menegaskan: SLO otentik yang dipadukan dengan Cultural Licence to Operate yang dihormati adalah fondasi etis — bukan aksesori — bagi Ekonomi Biru yang sah secara moral, bukan sekadar sah secara hukum.

Saran bagi Pemangku Kepentingan Indonesia

1. Integrasikan 8 prinsip etika ke kerangka ESG/TJSL & Peta Jalan Ekonomi Biru nasional.
2. Perkuat pengakuan hukum & *Cultural Licence to Operate* masyarakat adat pesisir — sebelum, bukan sesudah, izin terbit.
3. Gunakan metodologi *social listening*/persona untuk pemetaan pemangku kepentingan projek kelautan strategis.
4. Jadikan Integritas & *Care* sebagai penanda SLO yang otentik, bukan sekadar berada pada level *tick-box compliance*.

Terima Kasih

Mari membaca buku ini secara utuh, dan bersama-sama mewujudkan Ekonomi Biru yang adil, berkelanjutan, dan sah secara sosial bagi Indonesia.

Jalal

Chairperson of Advisory Board, Social Investment Indonesia (SII)

Social Investment Roundtable Discussion — SIRD #101 BLUE ECONOMY · 31 Juli 2026